

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M. dan Akbar, R. 2018. "Indonesian Local Government's Accountability and Performance: The Isomorphism Institutional Perspective." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 19, No. 1: 1-11. DOI: 10.18196/jai.190187.
- Akbar, R., Pilcher, R. A., and Perrin, B. 2015, "Implementing Performance Measurement Systems: Indonesian Local Government Under Pressure." *Qualitative Research in Accounting and Management* 12, No. 1: 3-33. <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013>.
- Argento, D., Peda, P., dan Grossi, G. 2017. "The Enabling Role of Institutional Entrepreneurs In The Adoption of IPSAS Within A Transitional Economy: The Case of Estonia." John Wiley & Sons, Ltd., Public Admin Dev., No. 38: 39-49. DOI: 10.1002/pad.1819.
- Baskoro, F. R., dan Akbar, R. 2018. "Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah". *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, No. 2: 52-63. DOI: 10.18196/jati.010206.
- Biswan, A. T. dan Alim, S. 2021. "Praktik Balanced Scorecard Sektor Publik: Sistem Pengukuran Kinerja untuk Meningkatkan Performa Organisasi". *Jurnal Bina Manajemen*, Vol. 9 No. 2: 184-205. DOI: 10.52859/jbm.v9i2.159.
- Creswell, J. W. dan Creswell, J. D. 2018. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fifth Edition." USA: SAGE Publications, Inc.
- Dewi, N. A. W. T. dan Dewi, L. G. K. 2022. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Informasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3506>.
- Dooren, W. V., Bouckaert, G., dan Halligan J. 2015. "Performance Management in the Public Sector: Second Edition." London: Routledge.
- Galib, M. dan Hidayat, M. 2018. "Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Pendekatan *Balanced Scorecard* Pada PT. Bosowa Propertindo." *Seiko Journal of Management and Business* 2, No. 1: 92-112. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gdvq4>.
- Husaini dan Akbar, R. 2015. "Evaluasi Pengembangan Indikator Kinerja Studi pada Badan Pusat Statistik (BPS)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 3, No. 2. <https://doi.org/10.22146/abis.v3i2.59314>.
- Kurniawan, D. dan Akbar, R. 2021. "The Evaluation of Performance Indicators Development: A Study on Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK)." *Journal of Accounting and Investment* 22, No. 3: 426-459. DOI: 10.18196/jai.v22i3.11157.
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., dan Agustiawan, A. 2021. "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran." *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal* 2, No. 2: 214-223. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2559>.

- Ngoye, B., Sierra, V., dan Ysa, T. 2018. "Assessing Performance-Use Preferences Through An Institutional Logics Lens." *Emerald Insight: International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2017-0344>.
- Tiro, A. A. A. dan Akbar, R. 2018. "Evaluasi Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja (Studi Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 6, No. 2. <https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59097>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2019. Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, Versi 14 Agustus 2019.
- Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 11/B/LA/VI/2022/01 Tahun 2022 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2022.
- Knowlton, L. W. dan Phillips, C. C. 2013. "The Logic Model Guidebook 2<sup>nd</sup> Edition: Better Strategies for Great Results." USA: SAGE Publications, Inc.
- Laila, R. dan Ermawati. 2021. "Performance Measurement in Local Government: Institutional Factors." *Journal of Social and Development Sciences* 12, No. 2: 35-44. [https://doi.org/10.22610/jsds.v12i2\(S\).3208](https://doi.org/10.22610/jsds.v12i2(S).3208).
- Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2022.
- Longo, P. J. 2002. "The Performance Blueprint, An Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management". Annual Conference of the American Evaluation Association. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471543.pdf>.
- Murdi, H. dan Putri, A. 2020. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh." *Jurnal Ekonomi* 23, No. 1: 50-66. DOI: <https://doi.org/10.47896/je.v23i1.189>.
- Parwoto dan Halim, A. 2020. "The Effects of Organizational and Political Factors on the Development of Performance Measurement System (PMS) of Local Government Institutions." *Journal of Accounting and Investment* 21, No. 2: 217-239. DOI: 10.18196/jai.2102146.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Luar Negeri.

- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Luar Negeri 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
- Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2024.
- Risakotta, K. A. dan Akbar, R. 2018. “The Effect of Internal and External Accountability, Job Motivation and Education on Local Government Official’s Performance.” *Journal of Indonesian Economy and Business* 33, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.22146/jieb.13921>.
- Hardani et. al. 2020. “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.” Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. 2012. “Qualitative Research Method.” London: Sage Publication Ltd.
- Sihaloho, F. L., & Halim, A. 2005. “Pengaruh Faktor-faktor Rasional, Politik, dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.” Simposium Nasional Akuntansi VIII. <https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/kasppa-02.pdf>.
- Sofyani, H., Akbar, R., dan C. Ferrer, R. 2018. “20 years of performance measurement system (PMS) implementation in Indonesian local governments: Why is their performance still poor?.” *Asian Journal of Business and Accounting* 11, No. 1: 151–184. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6>.
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/39/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021.
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/745/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/91/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2019.



Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<https://www.kemlu.go.id/portal/id/list/akip/akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/5050/berita/kemlu-raih-wtp-tujuh-kali-berturut-turut-dari-bpk>.

<https://kbbi.web.id>.